

STRATEGI *COPING* ORANG WORKWANA

Bernardus Renwarin

Abstract: This article reflects on the reality of life of a group of Papuan indigenous people who live in Workwana village, district of Arso, in Keerom regency. Studies on the village of Workwana have shown both empirically and theoretically that people of Workwana's lives have changed in many aspects. One of the changes that this study pays attention on is how Workwana people deal with coping strategy to develop sustainably their livelihoods. The strategy shows that people of this place have been struggling using their human capitals and being adapted to the changing situations in order to get survived in the middle of turbulent condition of life. How people of Workwana set the strategy to use the opportunities of livelihoods can be found throughout the article before you.

Keywords: *sustainable livelihood* • *human capital* • orang Workwana • kelapa sawit • *strategi coping* •

Karya tulis ini dipersembahkan untuk Profesor Nico Syukur Dister OFM di saat beliau merayakan usianya yang ke 80. Sebagai seorang pastor dari ordo Fransiskan beliau memutuskan hijrah ke Tanah Papua tahun 1983 meninggalkan STF Driyarkara Jakarta, untuk mengabdikan hidup dan ilmu pengetahuannya di Papua bagi pengembangan Gereja Katolik di Papua dan orang Papua melalui STFT Fajar Timur. Dari perjalanan hidupnya di Papua diketahui bahwa Pastor Nico Syukur Dister terlibat juga dalam pelayanan masyarakat melalui Panti Asuhan Putri Kerahiman Hawaii, dan Panti Asuhan Putra Polomo, di Sentani. Keterlibatannya di panti asuhan tersebut memperlihatkan betapa pedulinya Pater Nico Syukur pada orang Papua khususnya generasi muda. Oleh karena itu tulisan yang sederhana ini dibuat sebagai penghormatan kepada Profesor Nico Syukur Dister sebagai kolega di STFT Fajar Timur sekaligus juga sebagai pengungkapan rasa kebersamaan dalam kepedulian terhadap orang Papua. Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian atau pokok pikiran yakni, bagian pertama membahas tentang *sustainable livelihoods* dan strateginya, bagian kedua mengulas tentang *livelihoods* orang Workwana, bagian ketiga memuat catatan tentang krisis-krisis hidup orang Workwana,

bagian keempat melihat krisis-krisis hidup orang Workwana dari perspektif *sustainable livelihoods*. Bagian kelima membahas tentang strategi *coping* orang Workwana, dan bagian keenam merupakan catatan tentang makna dan fungsi strategi *livelihoods* serta bagian yang terakhir dibuatkan kesimpulan atas seluruh pembahasan.

Metode studi. Metode yang digunakan bersifat kualitatif, terdiri dari pertama studi literatur, berkaitan dengan konsep-konsep pembangunan khususnya *livelihoods* berkelanjutan dan bahan lain berhubungan dengan kelapa sawit serta keadaan orang Arso di Keerom. Kedua, melakukan studi lapangan untuk menghimpun data dengan teknik wawancara, pengamatan dan kelompok diskusi. Seluruh studi ini bersifat pendekatan *emic*, untuk memahami lebih jauh apa yang dipikirkan, dirasakan dan dialami masyarakat.

Apa Itu Strategi *Livelihoods* Berkelanjutan?

Chambers dan Conway (1991) menjelaskan bahwa jika seseorang atau sekelompok orang ingin hidup berhasil secara berkelanjutan, ia harus menggunakan strategi *livelihoods*.¹ Yang dimaksud dengan strategi *livelihoods* adalah melakukan *coping* sebagai usaha untuk menangkal tekanan dan guncangan hidup berkaitan dengan masalah kehidupan ekonomi rumah tangga. Ada berbagai strategi *coping* atau strategi *livelihoods* yang pernah digunakan, sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Kedua pakar tersebut mencatat sejumlah strategi *coping* yang biasa digunakan. Misalnya, *pertama*, strategi penghematan (*stint*). Strategi penghematan digunakan agar individu atau rumah-rumah tangga terhindar dari kebiasaan boros dan menjadi lebih selektif baik dalam hal mengkonsumsi sesuatu maupun dalam memanfaatkan kemampuan diri sendiri sebagai sumber daya utama dalam bekerja. *Kedua*, strategi pengumpulan (*hoard*). Strategi ini merupakan usaha untuk menggunakan aset-aset yang dimiliki sebagai modal yang dapat dikembangkan. *Ketiga*, strategi perlindungan (*protect*). Melalui strategi ini aset-aset dipelihara dan dilindungi untuk memulihkan dan memantapkan *livelihood*. *Keempat*, strategi pengosongan (*deplete*). Melalui strategi ini apa yang dimiliki digunakan sedemikian rupa sebagai modal atau sumber-sumber penghidupan rumah tangga seperti, menjual aset-aset yang ada. *Kelima*, strategi keragaman usaha (*diversity*). Dengan strategi ini seseorang bisa berupaya mencari sumber-sumber penghidupan lain melalui

¹Rahmato, 1987; Corbett, 1988; IDS, 1989; de Waall, 1989; Agarwal, 1990; Gill, 1991; Chen, 1991 (dalam Chambers & Conway, 1991).

berbagai aktivitas kerja sebagai sumber pemasukan. *Keenam*, strategi memperjuangkan hak-hak (*claim*). Dengan strategi ini diperjuangkan hak-hak hidup berkaitan dengan lingkungan hidup bersama masyarakat sebagai komunitas, NGO, pemerintah, komunitas internasional berdasarkan prinsip-prinsip tindakan politik yang adil. *Ketujuh*, strategi menggerakkan (*move*) maksudnya, berusaha membagi dan memberikan aset-aset kepada anggota-anggota keluarga untuk dikelola sebagai sumber atau modal penghidupan. Demikian sejumlah strategi *coping* ditawarkan sebagai strategi penanggulangan dan pemulihan keadaan rumah tangga yang sedang berada dalam keadaan tertekan dan tergoncang serta rentan terjebak dalam kemiskinan (Bdk. Chen, dalam Hussein & Nelson, 1998; Chambers & Conway, 1991).

Strategi *livelihoods* atau strategi *coping* juga dicontohkan oleh Karim Hussein dan John Nelson (1998). Hussein dan Nelson menjelaskan, pengalaman penduduk pedesaan di Ethiopia, Bangladesh, dan Mali menggunakan strategi *migrasi* ke daerah lain dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian serta diversifikasi *livelihoods* dengan memanfaatkan potensi rumah-rumah tangga sebagai pekerja utama di berbagai kegiatan usaha sehingga dapat memberi keuntungan yang maksimal bagi rumah tangga tersebut. Demikian beberapa contoh strategi *coping* yang pernah digunakan di berbagai berbagai tempat di dunia.

Selanjutnya akan diuraikan pengalaman orang Workwana berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu bentuk mata pencarian dalam bentuk pendekatan pembangunan ekonomi di Papua dan dampaknya bagi penduduk setempat.

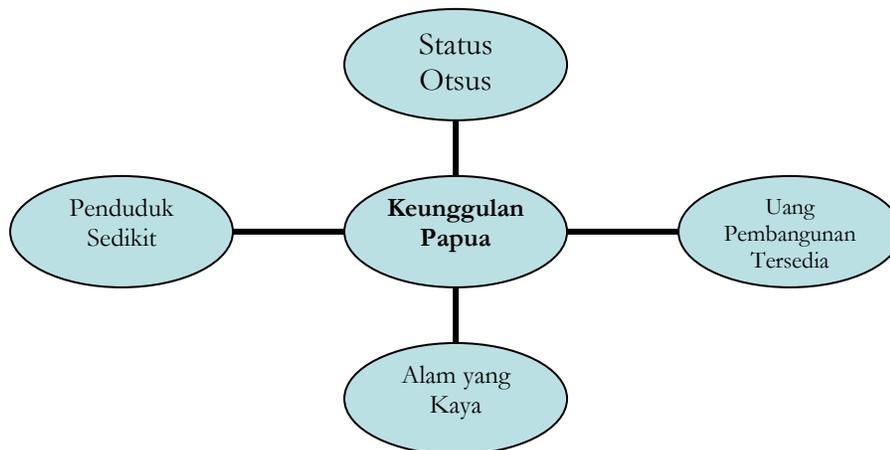
***Livelihoods* Orang Workwana: Perspektif Pembangunan di Papua**

Di satu sisi harus diakui bahwa berbagai perubahan dan perkembangan secara makro telah terjadi dalam kehidupan masyarakat di tempat ini sebagai dampak pembangunan secara signifikan, termasuk dampak pengembangan industri perkebunan kelapa sawit. Namun di sisi lain di tataran mikro kehidupan penduduk harus dikatakan pula bahwa pendekatan pembangunan seperti yang dilakukan selama ini telah menimbulkan persoalan-persoalan serius terhadap nasib penduduk, khususnya *livelihood* penduduk asli di Kampung Workwana dan sekitarnya. Yang ingin ditegaskan di sini ialah pendekatan pembangunan yang selama ini mengandalkan paradigma pertumbuhan, seperti yang terjadi melalui pengembangan industri perkebunan kelapa sawit, ternyata berkontribusi menghasilkan kesenjangan hidup antara penduduk asli setempat dengan masyarakat lainnya. Pengalaman seperti ini

bukan hanya terjadi di Workwana dan Arsokota tetapi terjadi juga di berbagai kampung di wilayah Kabupaten Keerom (Bdk. Ansaka dkk., 2009; Dale dan Djonga, 2011), bahkan terjadi pula di seantero Papua (Bdk. Suebu, 2007; Widjoyo dkk., 2009).

Realitas kesenjangan hidup luar biasa dialami orang Papua di kampung-kampung ditandai oleh keadaan tertinggal, kemiskinan parah, kematian yang tinggi, kehidupan tanpa akses dan tanpa infrastruktur dengan tingkat kemahalan yang luar biasa. Pada hal kondisi yang demikian sesungguhnya berbanding terbalik dengan potensi obyektif alam dan daerah yang amat kaya, sehingga keadaan tersebut dilukiskan Suebu (2007) dengan istilah “Paradoks Papua”, dan oleh Enembe (2015) disebut sebagai persoalan “7K”. Berikut ini disajikan suatu rangkuman pemikiran tentang keunggulan-keunggulan Papua yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah untuk mengatasi “Paradox Papua” atau persoalan “7K” Papua.

Gambar 1
Keunggulan-keunggulan Papua



Gambar di atas memunculkan beberapa pertanyaan yaitu, apakah keunggulan-keunggulan Papua sudah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kesejahteraan hidup OAP? Mengapa berbagai pendekatan pembangunan di Papua belum berhasil meningkatkan kesejahteraan orang Papua? Strategi pembangunan apa dibutuhkan agar keunggulan-keunggulan Papua yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan OAP saat ini dan di masa depan?

Menurut hemat penulis berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dan pertimbangan-pertimbangan yang eksistensial, Suebu dan Enembe mencoba menggagasi orientasi baru pembangunan Papua yang dimulai dari kampung.² Orientasi dan strategi baru pembangunan Papua yang lebih adil, sejahtera dan mandiri dilatar belakangi dua alasan. *Pertama*, selama ini kurang ada perhatian terhadap masyarakat di kampung-kampung yang menyebabkan masyarakat tetap miskin dan terbelakang (Bdk. Yustika, 2003; Winarno, 2008; Soedarmanta, 2012). *Kedua*, sebagian besar orang asli Papua berdiam di kampung-kampung terpencil dalam keadaan miskin, terbelakang dan tanpa akses (Widjojo dkk., 2009; Dale & Djonga, 2011; Suebu, 2011; Enembe, 2016).³ Distrik Arso mengalami perubahan dan perkembangan sebagai sebuah proses transformasi sosial ekonomi dan budaya yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan penduduk. Akan tetapi transformasi tersebut sekaligus juga telah menciptakan sejumlah krisis yang akibatnya menimbulkan ongkos social, ekonomi, moral dan budaya yang begitu mahal sebagai beban hidup luar biasa penduduk setempat. Fenomena krisis sebagai fakta sosial, ekonomi, politik dan budaya yang dialami penduduk asli di daerah perbatasan ini amat relevan dengan refleksi Soedjatmoko (1980) tentang masalah pembangunan dalam bukunya berjudul, Pembangunan dan Kebebasan. Menurutnya ide-ide pembangunan sebagai upaya mencari model pembangunan yang lebih demokratik hendaknya diwujudkan dalam praktek pembangunan. Dikatakannya ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan pembangunan yaitu perihal perubahan, ketertiban dan keadilan. Menurut Soedjatmoko, pembangunan selalu menghasilkan perubahan dan kemajuan di satu sisi tetapi di sisi lain pembangunan mengakibatkan pula *destabilitas*, *disparitas* pendapatan dan sosial yang berujung pada persoalan keadilan dalam pembangunan.

Menurut penulis, pembangunan juga menimbulkan proses *deteritorialisasi* terhadap penduduk lokal (Bdk. Dharmawan, dalam, Satria dkk, (Editor), 2011). Dengan demikian destabilitas, disparitas pendapatan dan sosial, ketidakadilan dalam pembangunan serta deteritorialisasi yang dialami masyarakat mengakibatkan terjadinya krisis serius di berbagai aspek kehidupan.

²Menurut UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf J, digunakan istilah kampung untuk menggantikan istilah desa.

³Lihat juga, Kompas, Kamis, 13 Desember 2012; Majalah Honai, Edisi XXV/Tahun II/Agustus 2013, Jayapura, Menakar Jumlah Orang Miskin di Papua.



Destabilitas di kalangan penduduk setempat mulai terlihat ketika terjadi gejolak politik di daerah perbatasan sehingga menimbulkan gerakan lintas batas besar-besaran di daerah Keerom tahun 1970-an dan 1984. Kemudian destabilitas juga berlanjut dengan pendekatan-pendekatan keamanan yang bersifat stigmatisasi dan intimidasi terhadap penduduk berkaitan dengan gerakan-gerakan politik OPM, sehingga Workwana ketika itu dicap sebagai “kampung merah” dalam kerangka proses politik pembangunan daerah. Destabilitas pun mencuat setelah perusahaan kelapa sawit di Distrik Arso yang hingga saat ini terus diprotes dan ditolak masyarakat. Masuknya berbagai pengaruh miras, ganja dan sejenisnya memengaruhi generasi muda dan masyarakat di daerah ini, merupakan situasi yang juga mengganggu keamanan umum dan ketentraman penduduk sebagaimana dituturkan masyarakat di daerah ini. Perasaan terancam oleh dampak pembangunan di bidang sosial, ekonomi, politik, lingkungan dan kependudukan terhadap penduduk asli setempat sebagai pemilik daerah yang kehilangan hak ulayat selalu menjadi bahan percakapan penduduk namun tidak diungkapkan secara terbuka kecuali diungkapkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dipercaya dengan berbagai pertimbangan. Fenomena ini merupakan gambaran suasana batin penduduk yang terus bergejolak di daerah ini tentang masa depannya dan nasib anak cucu mereka di kemudian hari.

Disparitas pendapatan dan kehidupan sosial dapat dilihat dari gejala-gejala seperti hasil-hasil usaha yang dijual di pasar atau di kios-kios di kampung, yang terbatas dari segi jumlah dan jenis barang antara penduduk asli dan kaum pendatang. Selain itu gejala disparitas ini juga dapat dilihat dari cara penduduk setempat memperoleh sesuatu di pasar yakni dengan cara berhutang kepada penjual atau pedagang baik Papua maupun non Papua. Fakta perbedaan dalam hidup sehari-hari terkait dengan kondisi rumah, perabot rumah tangga dan fasilitas-fasilitas yang digunakan dapat menunjukkan gejala disparitas antara penduduk asli setempat dengan masyarakat pendatang. Dominasi peran di bidang politik dan pemerintahan pun menunjukkan adanya fenomena *disparitas* sosial dalam kehidupan sehari-hari antara penduduk asli dan kaum pendatang baik di Workwana maupun di kampung-kampung sekitarnya.

Deteritorialisasi tentu berkaitan dengan hilangnya otoritas wilayah setempat berhubungan dengan hak-hak teritorial penduduk menyangkut hutan dan tanah yang telah dialihfungsikan untuk berbagai kepentingan pembangunan seperti, perkebunan sawit, perkantoran, perumahan, pemukiman warga Transmigrasi PIR dan lain-lain. Selain itu, alih



kepemilikan tanah-tanah di daerah ini kepada penduduk-penduduk migran baik Papua maupun non Papua sebagai daerah yang makin terbuka, bagian dari konsekuensi pembangunan daerah, makin menambah panjang deretan fakta deterritorialisasi hak-hak penduduk setempat dan berbagai krisis hidup penduduk, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

Krisis-Krisis Hidup Orang Workwana

Setelah 32 tahun kelapa sawit dikembangkan di daerah Keerom potret kehidupan penduduk setempat di Workwana memperlihatkan wajahnya yang traumatis menghadapi perubahan yang tidak lain adalah proses pembangunan itu sendiri. Perubahan tersebut ditandai oleh situasi di mana penduduk setempat sedang beranjak dari keadaan hidup *subsisten* (Bdk. Barnard dan Spencer, 1996),⁴ bergantung pada alam, hutan dengan segala sumber daya penghidupan yang ada di dalamnya, ke bentuk kehidupan baru yang lebih produktif. Bentuk kehidupan yang lebih produktif dalam konteks setempat diintrodusir kepada penduduk melalui industri perkebunan kelapa sawit. Bentuk kehidupan baru itulah yang dimaksud dengan proses transformasi sosial, budaya dan ekonomi sebagai dampak pembangunan yang sedang melanda kehidupan penduduk asli setempat.⁵ Proses transformasi sosial, budaya dan ekonomi yang sejatinya mengembangkan, memajukan dan meningkatkan mutu hidup penduduk ternyata berdampak menimbulkan destabilitas, disparitas pendapatan dan sosial serta deteri-

⁴Menurut Barnard dan Spencer (dalam, Alan Barnard & Jonathan Spencer (Ed.), *Encyclopedia Of Social And Cultural Anthropology*, Routledge, London & New York: 1996, 288-291), tipe “*hunter and gatherer society*” memperlihatkan dua hal. Pertama, kelompok ini merupakan suatu kategori sosial, tipe organisasi sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat yang bergantung pada kehidupan *subsisten* yaitu pada tumbuh-tumbuhan serta binatang-binatang liar yang ada di hutan. Selain itu tipe organisasi sosial masyarakat seperti ini merupakan bentuk masyarakat *egalitarian* yang sederhana. Kedua, bentuk masyarakat seperti ini dilihat sebagai suatu simbol solidaritas dari gerakan budaya suatu masyarakat. Pandangan ini dapat dikatakan sejalan dengan studi Boelaars (1986). Ia melihat budaya masyarakat Papua terbagi ke dalam dua tipe besar yakni masyarakat peramu dan petani.

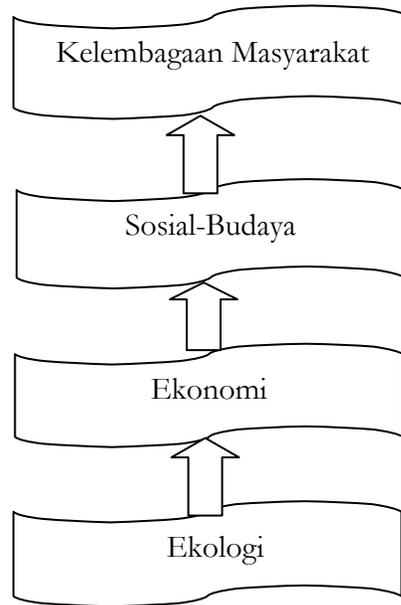
⁵Lihat beberapa studi tentang dampak perkebunan sawit bagi petani di Arso, misalnya, Edy Rosariyanto dkk., Penelitian Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura dan Sekretariat Pastoral Dekenat Keerom, Jayapura: Keuskupan Jayapura, 2008; Kristian Ansaka dkk., Dari Kampung Ke Kampung, Perjalanan Jurnalistik Suara Perempuan Papua, Jayapura: Tabloid Suara Perempuan Papua, 2009; Cypri J. P. Dale & John Djonga, Paradoks Papua, Pola-pola Ketidakadilan Sosial, Pelanggaran Hak atas Pembangunan dan Kegagalan Afirmatif, dengan Fokus di Kabupaten Keerom, Jayapura: FOKER LSM Papua, Yayasan Teratai Hati Papua, Arso, *Sunspirit For Justice and Peace*, 2011.

torialisasi yang memproduksi krisis serius berbagai aspek kehidupan orang Kampung Workwana. Dalam studi kasus ini krisis yang disoroti meliputi empat aspek dasar kehidupan penduduk setempat yakni, krisis ekologi, krisis ekonomi, krisis budaya dan krisis kelembagaan. Gambar di bawah ini merupakan penjelasan mengenai krisis-krisis dimaksud.

Gambar 2

Jenis-Jenis Krisis:

Ekologi, Ekonomi & Sosial Budaya & Kelembagaan



Krisis Ekologi (Lingkungan)

Krisis ekologi dapat dikatakan merupakan krisis material yang secara mendasar dan serius dialami dan berdampak signifikan terhadap *livelihood* orang asli setempat di satu pihak. Di lain pihak krisis ekologi atau krisis lingkungan tersebut berkaitan dengan rusaknya lingkungan hidup dan ekosistem yang berdampak signifikan merugikan penduduk asli setempat tidak hanya secara material tetapi juga merusak nilai, sistem dan tatanan kultural mereka. Untuk menganalisis krisis ekologi, pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan persoalan ekologi digunakan untuk melihat persoalan dimaksud.

Jain (2001) menjelaskan bahwa lingkungan hidup terdiri dari tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan memengaruhi yaitu, 1) unsur

fisik (pohon, tanah, batu, tanah, air dan lain-lain); 2) udara, cuaca dan angin, dan lain-lain; 3) makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan). Ketiga komponen ini membentuk satu jaringan terpadu dan serasi. Masing-masing komponen berada pada tempatnya dan berperan membentuk suatu ekosistem kehidupan yang terintegrasi dan harmonis. Namun masalah ekologi muncul ketika salah satu komponen dirusakkan. Dengan kata lain bila terjadi perubahan pada salah satu aspek ekosistem yang ada akan memengaruhi pula keseimbangan seluruh ekosistem tersebut. Merujuk pada pemikiran Jain di atas dapat dikatakan bahwa ekosistem yang terganggu di wilayah perkebunan kelapa sawit di daerah Workwana dan sekitarnya terjadi karena hutan-hutan ditebang, terjadi *deforestasi* dan *degradasi* lingkungan alam setempat. Keadaan ini berdampak menimbulkan krisis lingkungan hidup yang serius (Bdk. Aditjondro, 2003, 59-103 & 403-425; Frangky & Morgan (Penyunting), 2015). Dampak kerusakan ekologi atau lingkungan ternyata telah menimbulkan krisis berkepanjangan berkaitan dengan tersingkirnya *livelihood* subsisten (Boelaars, 1989) penduduk asli di sekitar perkebunan kelapa sawit sebagai suatu persoalan serius pembangunan di daerah. Hasil studi kasus di Workwana ini memperlihatkan krisis tersebut ditandai oleh fakta-fakta permasalahan lingkungan berikut. *Pertama*, hutan sebagai tempat dan sumber *livelihood* penduduk asli yang di dalamnya terdapat jenis-jenis flora dan fauna serta berbagai potensi kekayaan alam, hilang.⁶ Selain itu, hutan dengan tutupan humus organik dan sebagai daerah serapan air, habitat hewan liar dan berbagai tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia sebagai suatu ekosistem yang terpadu pun berubah fungsi, tidak dapat dimanfaatkan dan sulit ditemukan oleh penduduk di sekitarnya. *Kedua*, terjadi *degradasi* dan *deforestasi* hutan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan alam, tercemarnya tanah oleh berbagai jenis bahan kimia, meningkatnya bencana banjir di musim hujan dan kekeringan hebat di musim panas di daerah Distrik Arso. Fenomena yang dialami penduduk setempat sebagai akibat *degradasi* dan *deforestasi* lingkungan ketika musim hujan di beberapa daerah di wilayah Distrik Arso adalah banjir parah. Selain itu ketika musim kemarau daerah ini mengalami kesulitan air bersih untuk konsumsi dan keperluan rumah tangga serta suhu udara yang terasa amat panas. *Ketiga*, diakui oleh penduduk bahwa debit air di sumur-sumur masyarakat dari waktu ke waktu terus menurun dan terjadi peningkatan pencemaran air yang berdampak pada kesehatan penduduk karena air keruh, berbau dan terasa asam, sebagaimana juga diungkapkan oleh dr Evi

⁶Ansaka dkk. (2009) mencatat Perseroan Terbatas Perkebunan Nasional (PTPN) II Tanjung Morawa Medan telah membuka lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 51.310 Ha di daerah Kabupaten Keerom.



Kepala Balai Pengobatan St Lusia Workwana.⁷ Hal ini tentu disebabkan antara lain karena kelapa sawit yang ada di daerah ini cukup banyak menyerap air di satu sisi dan pasokan air terus berkurang akibat hutan-hutan gundul di sisi lain dan terjadi berbagai pencemaran air karena tanah-tanah mengalami pencemaran melalui berbagai jenis zat-zat kimia yang digunakan untuk pemupukan. Menurut informasi penduduk setempat, salah seorang peneliti asal Jepang beberapa tahun silam menyatakan di Workwana bahwa satu pohon sawit setiap hari menyerap air kurang lebih 6 sampai 8 liter. Hal ini dapat dibandingkan dengan hasil Penelitian Lingkungan Universitas Riau, yang menyebutkan bahwa satu pohon sawit setiap hari menyerap air sebanyak 12 liter.⁸ Pernyataan-pernyataan tersebut tentu mengindikasikan bahwa kelapa sawit memang mempunyai dampak terhadap lingkungan yang memengaruhi ketersediaan air secara memadai yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya. *Keempat*, sebagaimana dikatakan penduduk setempat, dengan dibabatnya hutan-hutan, penduduk setempat mengalami kesulitan memperoleh berbagai jenis bahan baku lokal berupa kayu, rotan dan lain-lain untuk keperluan membangun rumah, pembuatan pagar dan keperluan rumah tangga lainnya. Artinya hilangnya hutan-hutan berarti pula hilangnya bahan baku lokal sebagai sumber penghidupan yang biasa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan hidup penduduk setempat. Hilangnya berbagai bahan baku lokal mengakibatkan penduduk setempat semakin tak berdaya dan terpuruk. Sebagai perbandingan dapat dilihat hasil Studi Kasus di 5 Pulau Besar di Indonesia Periode 1990 s/d 2010,⁹ yang menyebutkan:

“Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit merubah tutupan lahan tidak hanya akan mengurangi stok karbon, akan tetapi juga mengancam kerusakan keanekaragaman hayati, berkurangnya cadangan air dan kualitas tanah dan berkurangnya habitat satwa yang dilindungi.”

⁷Syaiful Ahmad mengutip, hasil Penelitian Lingkungan Universitas Riau yang menyatakan, dalam satu hari satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter (ST. Ariful Amri MSc, dalam Riau Online, Pekanbaru). Di samping itu dicatat pula bahwa pertumbuhan kelapa sawit mesti dirangsang oleh berbagai macam zat fertiliser sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya (<https://adekrawie.wordpress.com/2007/07/27/dampak-ekologi-dan-lingkungan-akibat-perkebunan-sawit-skala-besar/>, diunduh 4 November 2016)

⁸(<https://adekrawie.wordpress.com/2007/07/27/dampak-ekologi-dan-lingkungan-akibat-perkebunan-sawit-skala-besar/>, diunduh 4 November 2016)

⁹Majalah Sawit Indonesia, 15 Februari-15 Maret 2014 (<http://id.linkedin.com/pub/majalah-sawit-indonesia/87/b36.885>, diunduh 26 Maret 2014)





Studi tersebut bertujuan memberi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perkebunan sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Merujuk pada pemikiran Goulet (1995) dan Keraf (2006) tentang pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan serta penduduk, hendaknya dijadikan acuan dari sisi etika pembangunan, karena prinsip keadilan menempatkan semua orang dan kelompok dalam peluang yang sama melalui proses pembangunan termasuk dalam menikmati hasil-hasilnya. Dengan kata lain dalam menerapkan prinsip keadilan tidak ada orang dan kelompok yang diperlakukan secara istimewa dan/atau diabaikan oleh negara. Artinya semua orang atau kelompok harus mempunyai peluang dan akses yang sama atau setara terhadap sumber-sumber ekonomi yang diatur negara (Bdk. Sen, 1999). Dalam konteks kerusakan lingkungan juga berlaku prinsip bahwa orang atau kelompok yang mendapat manfaat ekonomi paling besar, harus menanggung kerugian yang besar atau membayar secara proporsional kerusakan atau pencemaran yang diakibatkan oleh perilakunya terhadap lingkungan yang rusak. Dalam studi kasus ini justru penduduk Workwana dan sekitarnya yang menanggung beban ekonomi dan lingkungan yang rusak dan tercemar sehingga bertentangan dengan prinsip hidup berkelanjutan dan etika pembangunan.

Prinsip berkelanjutan. Prinsip ini mengandung paham bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mempertimbangkan aspek sumber daya ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian empat prinsip berikut mengharuskan kita memilih alternatif pembangunan yaitu: 1) hemat terhadap sumber daya; 2) hemat dalam penggunaan energi; 3) meminimalkan adanya limbah dalam setiap kegiatan pembangunan serta produksi ekonomi; 4) adanya prinsip keadilan bagi generasi-generasi berikutnya secara berkelanjutan, yang harus terhindarkan dari kerugian-kerugian material, spiritual, sosial-budaya dan terjamin mutu kehidupannya. Namun pendekatan pembangunan yang dilakukan ternyata bersifat ekstraktif (Bdk. Acemoglu & Robinson, 2014), sebagai kegiatan pembangunan ekonomi yang menguras atau mengeruk kekayaan lingkungan alam sebanyak-banyaknya sehingga berdampak mengakibatkan kerugian sebesar-besarnya bagi penduduk setempat khususnya generasi yang akan datang. Walaupun menurut hemat penulis perkebunan kelapa sawit memang mempunyai berbagai keunggulan tetapi sekaligus juga berdampak menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat, khususnya penduduk lokal di mana industri perkebunan kelapa sawit dikembangkan. Selain menimbulkan krisis ekologi, industri perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan krisis ekonomi.

Krisis Ekonomi

Dampak lain yang tidak kalah penting dan mengakibatkan terjadinya krisis berkepanjangan yang langsung menghancurkan kehidupan penduduk setempat ialah krisis ekonomi. Menurut Lamber Welib, salah seorang tokoh masyarakat dan pemuka Gereja setempat:

“Makanan sehari-hari orang di kampung ini sebenarnya berasal dari usaha berkebun seperti menanam ubi-ubian, keladi, pisang. Ada juga hasil kebun yang dijual dan uang itu untuk membeli beras dan lain-lain. Selain itu, orang kampung juga masih pangkur sagu, berburu binatang liar seperti babi, tikus tanah, burung di hutan dan cari ikan di kali. Tetapi saat ini bahan makanan dari kebun di hutan semakin menipis dan sulit karena hutan-hutan dibabat, kayu-kayu diambil oleh pengusaha kayu dan hutan beralih fungsi sebagai kebun kelapa sawit, perumahan dan lain-lain.”

Fakta yang disebutkan di atas menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, hilangnya aset dan akses ekonomi subsisten penduduk. Keadaan ini ditanggapi serius oleh penduduk setempat karena salah satu dampak dari hilangnya hak ulayat dan sistem tenurial setempat dengan segala sumber daya kehidupan yang ada dikalkulasi sebagai kerugian luar biasa bagi orang Workwana dan kampung-kampung tetangga di sekitarnya saat ini dan anak-cucu mereka di masa yang akan datang. Menurut penduduk setempat pembabatan dan pengalihfungsian hutan-hutan serta tanah masyarakat sebagai pusat *livelihoods* menjadi perkebunan kelapa sawit, menghilangkan aset-aset ekonomi dan menutup akses penduduk menikmati sumber daya kehidupan yang mereka miliki (Bdk. Chambers & Conway, 1991; Krantz, 2001). Artinya proses transformasi melalui pembangunan yang terjadi dengan pendekatan industri perkebunan kelapa sawit sebagai *livelihoods*-baru tidak otomatis berdampak meningkatkan kehidupan ekonomi penduduk setempat. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dan ketrampilan subsisten penduduk lokal berfungsi bagi *livelihoods*-subsisten. Ia membutuhkan proses adaptasi kognitif dan kultural sebagai habitus baru pengembangan kehidupan ekonomi. Dengan kata lain, pengetahuan dan ketrampilan subsisten menjadi disfungsi terhadap sistem industri perkebunan kelapa sawit sebagai *livelihoods* yang baru. Bahkan menurut penduduk setempat, kondisi yang berujung pada pemutusan hubungan mereka dalam kesatuannya dengan lingkungan alam sumber *livelihoods*, dilihat sebagai proses penyingkiran dan pemiskinan masyarakat.

Kedua, krisis ekonomi ternyata juga menimbulkan krisis psikologis. Penduduk setempat pun menilai pendekatan pembangunan ini selain

memiskinkan juga menimbulkan kebingungan, tekanan, putus asa dan trauma dalam hidup. Ungkapan-ungkapan pengalaman penduduk tersebut dirumuskan oleh John Djonga Pr,¹⁰ seorang misionaris yang bekerja sejak tahun 1992 di daerah ini, demikian:

“Hampir semua orang menjadi bingung, cemas, ragu-ragu dan gelisah karena perubahan yang begitu cepat dan menyeluruh. Tidak sedikit orang yang mengalami shock ekonomi, merasa masa depan suram dan putus asa. Arah hidup menjadi kabur karena tuntutan ekonomi yang luar biasa. Bila hari ini mereka mendapatkan uang maka uang tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan hati saja. Kebiasaan menyimpan uang atau memanfaatkannya untuk hal-hal yang memang dibutuhkan belum tertanam baik dalam tindakan mereka.”

Pengalaman yang mencemaskan, menggelisahkan, pengalaman *shock* ekonomi, arah hidup tidak jelas, bahkan putus asa dan traumatis ini merupakan ekspresi tentang ketidakpastian akan masa depan bagi penduduk asli, bukanlah realitas yang dibuat-buat. Kondisi ini merupakan realitas kehidupan penduduk asli Workwana dan sekitarnya yang sedang mengalami frustrasi dan kebingungan karena saat ini mereka berada dalam keadaan tanpa aset dan akses untuk membangun hidup yang lebih baik.

Ketiga, ketika perkebunan sawit mulai dikembangkan, perusahaan mengambil kredit bank untuk membiayai penyelenggaraan perkebunan. Ketika masa panen, penduduk setempat sebagai petani plasma dan semua peserta PIR, diwajibkan ikut menyelesaikan beban kredit perusahaan dengan memotong uang hasil penjualan sawit petani. Pembayaran kredit ini dirasakan sebagai beban ganda yang memberatkan petani karena mereka pun harus membayar ongkos-ongkos pribadi seperti, ongkos truk yang mengangkat TBS ke pabrik, ongkos buruh tani yang memetik dan memikul sawit serta ongkos makan, rokok serta sejumlah setoran wajib yang harus diberikan kepada kelompok tani dan lain-lain. Pengalaman ini terus berlangsung sampai kredit tersebut lunas terbayar, pada hal dari waktu ke waktu hasil panen terus menurun sehingga sejumlah orang menjual lahannya dan yang lain melepas kepada pihak lain dengan sistem kontrak. Keterlibatan petani Kampung Workwana dan sekitarnya sebagai pemilik lahan atau tuan lahan menyelesaikan kredit perusahaan sebagai suatu proses pertukaran dari sistem yang tidak adil dan tidak seimbang. Bahkan petani

¹⁰ Lihat Rosariyanto dkk. (2008) & Ansaka dkk. (2009).



merasa sebagai tuan lahan, mereka hanya diperas sehingga tak berdaya dan dimiskinkan.

Jadi akselerasi pembangunan melalui pendekatan ekonomi seperti ini dapat dikatakan telah merongrong hakekat hidup penduduk lokal yang subsisten dengan kekayaan alam yang mengandung anekaragam hayati dan menjadikannya petani perkebunan monokultur yang tidak beruntung. Pendekatan pembangunan ekonomi yang ekstraktif (Bdk. Acemoglu & Robinson, 2014, 77-80) seperti ini ternyata telah menimbulkan masalah yang serius bagi masa depan orang asli Papua. Lebih dari itu pendekatan ini justru dicurigai oleh penduduk setempat sebagai realisasi kepentingan dan tujuan politik (fungsi laten) pembangunan daerah perbatasan atas nama kepentingan dan tujuan pembangunan ekonomi (fungsi manifest) di daerah. Pandangan dan penilaian ini muncul di kalangan penduduk setempat karena pengalaman dengan sistem usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Workwana telah memposisikan penduduk asli setempat yang semula merupakan tuan lahan dengan alamnya yang kaya menjadi penduduk yang tunalahan dan miskin serta tak berdaya. Krisis lain yang juga diakibatkan oleh adanya industri perkebunan kelapa sawit ialah krisis sosial-budaya.

Krisis Sosial-Budaya

Krisis ekologi dan ekonomi bagi orang Papua bukanlah dua aspek yang berdiri sendiri. Krisis-krisis tersebut secara langsung berkaitan dengan *world view* (Geertz, 1973; Mantovani, 1991; Alua, 2004; Franklin, 2007) penduduk asli di mana terdapat sistem nilai, struktur dan sistem sosial budaya sebagai kerangka acuan hidupnya.

Menurut Geertz, di dalam setiap *world view* terdapat dua hal pokok. Hal pokok dimaksud ialah *pertama*, aspek moral (dan aspek estetika) sebagai unsur yang bersifat *evaluatif*, biasanya disadari sebagai etika dalam suatu masyarakat; *kedua*, terdapat aspek kognitif sebagai unsur esensial, berupa pengetahuan tentang alam dan manusia yang menjadi pegangan hidup suatu kelompok masyarakat. Aspek kognitif seperti ini secara filosofis disebut oleh Fay (1997) sebagai “epistemologi orang dalam”. Maksudnya pengetahuan tentang alam, manusia dan kehidupan suatu entitas sosial budaya dalam lingkungan tertentu hanya diketahui oleh kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan tersebut. Implikasi sosialnya ialah kelompok luar atau kelompok lain perlu memahami apa yang menjadi pengetahuan setempat termasuk aspek moral yang menjadikannya tetap eksis. Konsekuensinya, mengabaikan “epistemologi orang dalam” berarti meremehkan eksistensi kelompok atau komunitas setempat. Sejalan dengan

pikiran Geertz dan Fay, Franklin (2007), juga menyatakan bahwa dalam *world view* suatu kelompok masyarakat terhimpun paham tentang nilai-nilai hidup dan nilai-nilai tersebut biasanya digunakan sebagai prinsip moral dan rujukan dalam bertingkah laku serta cara memandang kehidupan dan dunia. Apa yang dijelaskan Geertz dan Franklin terkait nilai-nilai masyarakat, diuraikan secara lebih terperinci oleh Mantovani (1991) dan Alua (2004).

Untuk menganalisis latar belakang krisis sosial-budaya yang dialami orang Workwana, penulis menggunakan penjelasan Mantovani dan Alua untuk memahami permasalahan tersebut. Menurut Mantovani (1991) kehidupan orang Melanesia pada umumnya, khususnya Orang Papua, dibangun berdasarkan sistem nilai yang secara tradisional ada dalam *world view* yang terdiri dari unsur-unsur penting yaitu *community* (hubungan darah dan perkawinan), *relationships* (hubungan dengan sesama, leluhur dan tanah) dan *exchange* (resiprositas). Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang substansial dalam kehidupan penduduk asli setempat. Berdasarkan nilai-nilai dasar tersebut, pendekatan pembangunan melalui perkebunan sawit yang membat habis hutan dan menguasai lahan-lahan masyarakat sehingga terjadi alihfungsi hutan dan lahan, sudah jelas bertentangan dan merusak nilai-nilai dasar Orang Papua, yang mengutamakan *community*, *relationship* dan *exchange*. Dikatakannya *community* dirusakkan karena penghargaan akan kelompok dan persekutuan hidup dengan pola hubungan yang seimbang dan saling menghargai, ditransformasikan ke dalam sistem dan struktur sosial baru lewat sistem PIR yang berwatak kapitalis (Bdk. Alatas, 1988, 3-47). Dalam perspektif *Community Development* (Ife, 2002), secara ekologis (Bdk. Erari, 1997; Alua (2004), pembangunan dilihat lebih holistik, berkelanjutan, beragam dan seimbang antara berbagai kepentingan di mana manusia dalam sistem sosial-budaya tertentu merupakan bagian dari sistem ekologi tersebut. Sejalan dengan pemikiran Ife, Hettne (2001, 347-350) menjelaskan bahwa proses pembangunan yang mengancam sistem ekologi suatu kawasan, merupakan ancaman kultural bagi kelompok etnis yang hidup di tempat tersebut.

Krisis Kelembagaan Masyarakat

Intervensi pembangunan melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah ini, dalam studi kasus yang dilakukan ternyata juga memperlihatkan bahwa pembangunan yang dilakukan berdampak menggeser aspek kelembagaan penduduk asli di Kampung Workwana dan kampung-kampung sekitarnya. Ketika aspek kelembagaan masyarakat kampung tergeser akibat pembangunan, muncul krisis serius kelembagaan masyarakat



setempat yang sudah terstruktur dalam hidup masyarakat setempat. Dengan kata lain secara kelembagaan kampung yang sebelumnya otonom menjadi tidak otonom lagi bahkan dikalahkan karena tekanan intervensi politik, ekonomi, sosial budaya yang lebih besar dan kuat sebagai bagian dari sistem dan struktur negara bangsa (Bdk. Kartodiharjo & Jhamtani, 2006; Kolopaking (dalam Satria dkk., 2011). Krisis kelembagaan yang ditemukan dapat dilihat dari fenomena berikut: penggunaan undang-undang dan aturan-aturan negara sebagai dasar hukum untuk pengalihfungsian tanah ulayat demi kepentingan perkebunan kelapa sawit mengalahkan hukum adat dan hak ulayat masyarakat setempat; penduduk saling klaim hak ulayat ketika ada pelepasan tanah adat kepada pihak perusahaan melalui pemerintah sebagai gejala kapitalisasi tanah adat yang tidak pernah terjadi sebelumnya; terjadi penggunaan wilayah segi tiga emas oleh oknum-oknum warga kampung tertentu secara sepihak untuk kepentingan bisnis pribadi, menimbulkan protes warga kampung tetangga karena wilayah tersebut merupakan wilayah hutan lindung bersama beberapa kampung di Distrik Arso; tokoh-tokoh adat dimanfaatkan oleh PTPN II sebagai pegawai perusahaan untuk mengamankan kepentingan perusahaan dari tuntutan-tuntutan masyarakat adat dan situasi seperti ini rentan menimbulkan konflik antarwarga. Hal ini menimbulkan keadaan dilematis pada tokoh-tokoh adat setempat, apakah berpihak pada kepentingan masyarakat atau kepentingan perusahaan; sistem *tenurial* setempat diabaikan karena dalam transaksi pelepasan tanah, hak-hak dasar masyarakat di bidang sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan hidup diganti dan dihargai dengan uang serta barang-barang yang oleh masyarakat dinilai tidak setimpal. Apa lagi cara-cara yang digunakan dalam transaksi tersebut menurut penduduk setempat bersifat manipulatif, karena janji-janji tidak pernah ditepati perusahaan, penuh kekerasan dan tidak adil; peran *Yuskwondor* dan *Sagaiiken* di wilayah ini sebagai kepala kampung, kepala adat dan penguasa tanah-tanah yang tidak berpenduduk tidak diperhitungkan lagi. Dengan begitu dapat dikatakan pendekatan pembangunan yang dilakukan ternyata bersifat ekstraktif (Acemoglu & Robinson, 2014). Dikatakan demikian karena kegiatan pembangunan ekonomi tersebut menguras atau mengeruk kekayaan lingkungan alam sebanyak-banyaknya, mengabaikan sistem kelembagaan masyarakat dan sistem sosial-budaya setempat sehingga berdampak mengakibatkan kerugian besar bagi penduduk setempat khususnya generasi yang akan datang.

Jadi krisis-krisis yang dialami penduduk setempat sebagai dampak pembangunan seperti ini bukan sekedar suatu mitos pembangunan yang menimbulkan trauma. Dengan merujuk pada Lauer (1993, 3) yang mengutip Spicer, menyatakan bahwa perubahan-perubahan (baca: pembangunan)



sebagai sesuatu yang menimbulkan trauma bagi masyarakat karena perubahan dialami sebagai siksaan, menimbulkan krisis, dan muncul sebagai agen asing yang tidak dikehendaki. Walaupun pembangunan dapat menimbulkan berbagai perubahan di satu sisi tetapi sekaligus juga menghasilkan trauma di sisi lain karena hal-hal berikut, a) perubahan itu dibayangkan dapat mengancam keamanan mendasar manusia; b) perubahan itu sesuatu yang tidak dipahami; c) perubahan itu merupakan suatu hal yang dipaksakan terhadap penduduk. Dalam konteks masyarakat atau penduduk asli di Workwana dan sekitarnya, perubahan dan dampak pembangunan bukan merupakan sebuah mitos tetapi suatu realitas empiris penduduk yang dialami sebagai suatu siksaan yang membuat penduduk menderita dan kehilangan harapan hidup serta berada dalam keadaan traumatis berkepanjangan.

Krisis Ekologi, Ekonomi, Budaya dan Kelembagaan: Perspektif *Sustainable Livelihood*

Pendekatan *Livelihood* atau yang disebut *Sustainable Livelihood* (SL) memposisikan masyarakat dengan kapabilitas dan aset-aset (seperti, sumber daya alam, hak dan akses) serta aktivitasnya sebagai potensi yang dapat menciptakan suatu kehidupan yang bermakna di tingkat lokal sebagai salah satu ciri dari ide-ide pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh dikatakan Chambers dan Conway, serta Krantz dan pemikir *livelihoods* lainnya, *sustainable livelihoods* (SL) mempunyai kontribusi yang menguntungkan secara berkelanjutan bagi kehidupan generasi berikut, baik jangka pendek maupun jangka panjang di aras lokal dan global. Aset-aset dalam SL yang terdiri dari berbagai bentuk disebut juga sebagai modal-modal bagi manusia. Oleh karena itu, dalam SL aset-aset atau modal-modal yang dimiliki manusia dilihat sebagai potensi yang dapat menangkal dan menanggulangi tekanan serta goncangan hidup yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang rentan terjebak dalam kemiskinan (Chambers & Conway, 1991; Krantz, 2001). Berdasarkan kekuatan yang dimiliki SL sebagai suatu perspektif tentang kehidupan manusia dan potensi-potensi yang terintegrasi di dalamnya secara berkelanjutan, krisis-krisis yang disebutkan di atas mau dianalisa dan direfleksikan sebagai berikut.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya SL mempunyai sejumlah kekuatan: *pertama*, terkandung kemampuan untuk melihat secara menyeluruh baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial sebagai modal manusia; *kedua*, terdapat pendekatan-pendekatan yang dilakukan baik bersifat mikro maupun makro secara berjejaring, memungkinkan seseorang



atau suatu rumah tangga mengatasi kerentanan-kerentanan yang ada dengan cara mengevaluasi dan memprogramkan masalah-masalah sosial ekonomi secara lebih realistik.

Secara singkat dapat dikatakan krisis-krisis ekologi, ekonomi dan sosial budaya dan kelembagaan ternyata berdampak menimbulkan kesulitan masyarakat di Workwana dan sekitarnya mencari nafkah sebagaimana biasanya didapatkannya dari kekayaan alam yang tersedia baginya. Kesulitan hidup ini dapat disebut sebagai keadaan hidup miskin karena tidak ada lagi *livelihood* penduduk yang terdiri aset-aset yang kelihatan (*tangible assets*). Dalam konteks lingkungan alam Workwana tidak terdapat lagi berbagai jenis binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sagu dan lain-lain sebagai bahan pokok konsumsi sehari-hari penduduk dan semakin sulit menemukannya di sekitar kampung dan hutan-hutan yang tersisa. Selain hilangnya *tangible assets*, hilang pula hak-hak dan akses-akses (*intangible assets*) karena terjadi alihfungsi dan alihkepemilikan berbagai asset yang dipunyai. Keadaan ini tentu menyebabkan penduduk setempat tak berdaya karena kehilangan *livelihood* yang menjadi tumpuan utama hidupnya yakni hidup subsisten. Perubahan-perubahan yang begitu cepat menghilangkan kebiasaan-kebiasaan dan kearifan-kearifan yang selama ini masih dijalani dan mendorong penduduk Workwana menyesuaikan diri dengan cara berpikir dan bertindak menurut paradigma *production thinking*, *employment thinking* dan *poverty line thinking* (Chambers & Conway, 1991). Artinya bila Orang Workwana ingin melanjutkan kehidupannya atau mengembangkan *livelihoodnya*, mereka harus terlibat berproduksi melalui kebun kelapa sawit. Itu berarti Orang Workwana harus menjadi pekerja di perkebunan kelapa sawit baik sebagai petani maupun buruh tani, karena bila tidak demikian Orang Workwana akan tersingkir dan semakin sulit mencari nafkah karena *livelihood*-baru menuntutnya demikian, dia harus mencari nafkah melalui kelapa sawit. Akibatnya ukuran kesejahteraan bagi penduduk ini ditentukan dengan menggunakan alat ukur dunia industri, yakni manusia menjadi alat produksi melalui usaha perkebunan kelapa sawit. Pendekatan inilah yang dikritik oleh Chambers dan Conway dan penulis *livelihoods* lain. Dari informasi penduduk setempat usaha perkebunan kelapa sawit dengan tuntutan biaya-biaya, seperti kredit perusahaan yang dibebankan kepada petani, ongkos sewa buruh, makan minum buruh dan sewa kendaraan pengangkut TBS, pengeluaran-pengeluaran ekstra di pabrik untuk petugas dan berbagai biaya lainnya ternyata hanya menjadi beban penduduk yang makin membuat mereka hidup terpuruk. Keadaan ini makin terasa berat ketika hasil panen dari waktu ke waktu menurun sesuai dengan usia tanam yang lebih dari 32 tahun, kurang berproduksi seperti masa sebelumnya, di satu pihak. Di lain pihak sebelum terjadi perubahan dan alihfungsi lahan,

penduduk setempat adalah tuan lahan, pemilik lahan yang kapan saja ingin mengolah dan memanfaatkan hutan yang kaya itu dapat dilakukan sesuai kebutuhannya. Kenyataan saat ini menunjukkan hal yang berbeda, karena mereka hanya bisa menjadi buruh atau pekerja yang tunalahan. Dengan kata lain tersingkirnya SL setempat menjadikan orang-orang di Workwana, termasuk juga penduduk di beberapa kampung sekitar, apa yang disebut Zen (1999; 2000) berada dalam keadaan *deprivasi*. Artinya mereka kini berada dalam keadaan *deprivasi* karena tersingkirnya SL dan dengan demikian berarti tersingkir pula modal-modal hidup yang ada di dalamnya. Pada hal menurut Scoones (1998) dan Krantz (2001) di dalam SL terdapat berbagai kapital, yaitu *natural capital* (tanah, air, udara, sumber-sumber daya terbarukan dan jasa lingkungan, seperti sistem peredaran air, pengolahan limbah dan lain-lain,) *economic* atau *financial capital* (uang, kredit/debit, tabungan, dan aset-aset ekonomi lainnya seperti infrastruktur dasar, alat-alat produksi dan teknologi), *human capital* (ketrampilan, pengetahuan, kemampuan kerja dan kesehatan yang baik, kemampuan fisik) dan *social capital* (jejaring, hak-hak sosial, relasi sosial, afiliasi-afiliasi dan asosiasi-asosiasi) yang dapat digunakannya.¹¹

Krisis-krisis yang disebutkan di atas mengakibatkan orang Workwana meninggalkan urusan kelapa sawit dan menyerahkannya kepada orang lain. Dengan kata lain, usaha kelapa sawit sebagai *livelihood*-baru mengganti *livelihood*-subsisten ditinggalkan. Ada beberapa cara orang Workwana melepaskan diri dari urusan kelapa sawit yaitu, menjual kebun kelapa sawit atau mengontrak kebun kelapa sawit pada orang lain. Pertanyaan yang muncul kemudian ialah bagaimana kehidupan orang Workwana selanjutnya? Bagaimana *livelihoods* penduduk selanjutnya? Strategi hidup apa yang dikembangkan penduduk? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan dijelaskan berikut ini.

Strategi *Coping* Orang Workwana

Strategi *coping* yang dilakukan orang Workwana secara eksistensial merupakan reaksi dan proteksi terhadap berbagai krisis yang dialami. Strategi *coping* ini pun merupakan suatu pengalaman empiris *adaptatif* penduduk yang berproses dari situasi kehidupan yang *subsisten* ke keadaan *livelihoods* berkelanjutan. Studi lapangan ini menunjukkan bahwa strategi *coping* yang dilakukan orang Workwana ternyata berbeda-beda menurut kategori kelompok masyarakat sesuai latar belakang keberadaannya.

¹¹Sachs (2005) menyebut modal-modal atau *capital* demikian: *human capital*, *business capital*, *infrastructure*, *natural capital*, *public institutional capital*, *knowledge capital*.



Kelompok-kelompok tersebut terdiri dari kaum tua, kaum perempuan, kaum muda berpendidikan dan kaum tuna karya.

Pertama, kelompok kaum tua dan dewasa. Kelompok kaum tua ini pada umumnya terdiri dari kaum laki-laki di kampung yang dari sisi *livelihood* sehari-hari bergumul dengan aktivitas *subsisten*. Kelompok ini masih berpegang pada tradisi setempat, beraktivitas melalui kegiatan-kegiatan *subsistensi* di wilayah yang memungkinkannya bergiat mempertahankan hidupnya. Kelompok ini juga termasuk orang-orang yang berjuang mengelola kebun sawit 32 tahun lalu dan mengalami masa-masa sulit di awal-awal perubahan dan perkembangan daerah ini. Dari antara mereka kaum tua ada yang direkrut menjadi karyawan perusahaan sebagai siasat melibatkan penduduk setempat sekaligus sebagai simbol kerjasama dan pengakuan masyarakat terhadap perusahaan.

Kedua, kelompok perempuan Workwana. Kelompok ini ternyata merupakan kelompok potensial yang berinisiatif mencari jalan terhadap kemandegan *livelihood* keluarga di kampungnya. Salah satu prinsip yang dikemukakan kelompok ini dan yang memotivasi mereka ialah, “*kalau kita berusaha pasti bisa*”. Kelompok ibu-ibu paruh baya ini masih tetap semangat berusaha menanggulangi persoalan tekanan hidup di kampungnya agar dapat terus bertahan dalam semangat SL. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti sudah diungkapkan terlebih dahulu ialah berjualan di pasar Workwana setiap sore hari dari jam 15.30-18.30 WIT, mengusahakan kios dan memelihara ternak di kampung. Dari pengamatan selama penelitian pada sore hari di pasar terlihat dengan jelas selain ibu-ibu paruh baya terdapat juga perempuan-perempuan muda Workwana berjualan di pasar. Menurut kelompok ini, berjualan di pasar bermanfaat karena di tempat ini ada peluang barang jualan dibeli orang dan dengan demikian mereka mendapat uang yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk membiayai anak sekolah. Selain kegiatan berjualan, terdapat pula sejumlah perempuan muda dan dewasa bergiat sebagai buruh tani di perkebunan kelapa sawit di Distrik Arso Timur yang diurus oleh perusahaan Rajawali. Berkaitan dengan permasalahan hak-hak atas hutan dan tanah yang terus dipersoalkan masyarakat, menurut kaum perempuan, itu merupakan urusan bapak-bapak dan kaum lelaki.

Ketiga, kelompok terdidik atau berpendidikan. Kelompok ini pada umumnya terdiri dari golongan muda potensial yang berpendidikan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Kelompok ini bergiat dalam berbagai profesi sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Keerom. Terdapat beberapa orang yang menjadi pegawai negeri sipil yang pada umumnya bekerja di Kabupaten Keerom dan mempunyai posisi-posisi yang baik. Ada



pula yang bergiat di bidang politik sebagai anggota legislatif dan ada pula yang aktif sebagai pegawai swasta di beberapa lembaga swasta. Selain itu, terdapat pula sejumlah orang yang berprofesi sebagai pengusaha. Kelompok muda berpendidikan ini juga menjadi kelompok yang ikut prihatin dengan situasi daerah, kampungnya dan masyarakat adat terkait perjuangan penduduk baik di Workwana maupun Arsokota yang terus menuntut hak atas tanah-tanah yang digunakan sebagai perkebunan sawit. Hal tersebut menjadi keprihatinan mereka juga karena masalah hak ulayat berkaitan dengan aset-aset SL orang tua, marga dan masa depan suku atau keretnya. Jadi baik kelompok tua maupun kelompok muda terdidik sama-sama menyadari betapa penting suatu lingkungan hidup berkelanjutan (*environmental sustainability*) agar sebagai suatu entitas masyarakat terjadi pula kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkelanjutan (*social sustainability*) sebagai unsur-unsur penting SL.

Keempat, kelompok tunakarya. Kelompok ini pada umumnya terdiri anak-anak muda yang tidak bersekolah dan yang putus sekolah. Kelompok ini pada umumnya tidak mempunyai ketrampilan khusus seperti orang tua mereka sehingga mereka tidak melanjutkan lagi aktivitas subsistensi. Menurut penuturan informan yang ditemui di kampung, kelompok ini pada umumnya tidak bergiat secara *subsistensi* karena mereka tidak dibiasakan berburu binatang dan melakukan kegiatan *subsistensi* lainnya sehingga tidak punya pengalaman seperti orang tua mereka karena tempat-tempat sumber *livelihood* untuk melakukan aktivitas *subsistensi* tidak ada lagi. Oleh karena itu, mereka memilih bergiat sebagai tukang ojek, penunggu pos adat yang menerima setoran mobil pengangkut kayu olahan dari berbagai tempat yang melintas di depan kampung Workwana. Selain itu, kelompok ini biasanya melakukan juga pekerjaan-pekerjaan tertentu di dalam kampung yang diberikan oleh pemerintah kampung seperti memperbaiki pagar atau memperbaiki rumah warga. Menurut beberapa tokoh masyarakat, kelompok ini tidak mempunyai ketrampilan yang mumpuni sehingga kelompok ini tampil sebagai kelompok tunakarya yang rentan dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu suasana dan ketenangan masyarakat di kampung.

Makna dan Fungsi Strategi *Livelihood*

Dari sisi pendekatan studi, studi kasus ini tidak hanya dilihat sebagai sebuah gerakan sosial penduduk memperjuangkan hak-hak dasar berkaitan dengan hak atas tanah tetapi ini juga mengandung sebuah gerakan moral kolektif penduduk. Berdasarkan fakta empiris dan mencermati fenomena-fenomena





yang mencuat dalam perjuangan SL penduduk perlu dicari arti atau makna serta peran dan fungsi dari usaha-usaha tersebut. Beberapa hal dapat dicatat sebagai berikut.

Pertama, sikap resistensi. Sikap ini berisikan bentuk-bentuk tuntutan terkait dengan batas waktu penggunaan tanah ulayat penduduk, perlakuan yang tidak adil dalam imbalbeli tanah masyarakat dihubungkan dengan identitas lokal, identitas marga atau keret dan suku. Sikap resistensi masyarakat sesungguhnya mengandung makna sebagai sebuah tindakan moral sosial kolektif penduduk didasari pada *world view* dan prinsip nilai-nilai hidup masyarakat karena resistensi ini tidak dilakukan secara perorangan tetapi meliputi seluruh kelompok marga atau keret di wilayah Distrik Arso. Sikap resistensi moral sosial kolektif ini merupakan bentuk penolakan terhadap kesewenang-wenangan negara dan korporasi besar yang telah memperlalat aparat keamanan untuk membungkam masyarakat agar dapat memenuhi program pembangunan BUMN atas nama pembangunan nasional. Dengan demikian resistensi sebagai tindakan moral sosial kolektif merupakan suatu strategi masyarakat mendorong penguasa atau pemerintah mengakui hak komunitas masyarakat adat di wilayahnya. Sikap resistensi ini telah diperjuangkan sampai ke Jakarta melalui DPR Pusat bahkan telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika itu.

Ketiga, resistensi moral sosial sebagai sebuah usaha kolektif masyarakat memperjuangkan kembali hak-hak dan aset-aset sebagai unsur pokok SL yang menjamin kesejahteraan dan masa depan generasi yang akan datang merupakan suatu tantangan. Dikatakan demikian karena masalah yang ditemui di sini antara lain seperti dikutip Malak (2005), tentang pernyataan Gibb dan Bromley bahwa ada tiga jenis klaim terhadap tanah yaitu, klaim negara, klaim pribadi dan klaim komunal masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Yang lebih rumit lagi ialah menurut Marti (2008), ada beberapa regulasi yang tidak pro-rakyat, misalnya UU No.5/1999 tentang Hak Guna Usaha (HGU) kepada seseorang atau badan hukum tidak bisa diklaim masyarakat lokal atas izin negara terhadap HGU tersebut yang sebelumnya merupakan tanah komunal. Selain itu, UU No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan mengizinkan penggunaan lahan 35 tahun dan dapat diperpanjang 3 kali sehingga mencapai 120 tahun. Kemudian UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menempatkan hak-hak investor di atas hak-hak masyarakat untuk memperpanjang HGU awal 60 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 35 tahun. Menurut Marti, regulasi-regulasi ini berlaku untuk konsesi pertambangan, perkebunan, industri bubur kertas dan penebangan kayu. Artinya regulasi-regulasi ini memperumit tuntutan masyarakat atau penduduk lokal karena tidak pro rakyat tetapi pro penguasa

dan korporasi besar dan pemodal besar. Maka dilihat dari azas keadilan dan prinsip etika pembangunan yang menjadi prinsip SL terkait hak-hak rakyat di bidang sosial, budaya dan ekonomi, regulasi-regulasi yang tidak pro-rakyat perlu dikaji lagi karena ternyata menyusahkan bahkan menyengsarakan bahkan mendorong dan menggiring masyarakat khususnya penduduk lokal masuk ke dalam perangkap kemiskinan karena hidup tanpa modal-modal yang seharusnya ada (Scoones, 1998; Krantz, 2001; Sachs, 2005).

Kedua, strategi *coping*. Sebagaimana dijelaskan di atas strategi ini pada umumnya dilakukan oleh penduduk Kampung Workwana dengan beragam usaha kegiatan untuk menanggulangi masalah tekanan dan guncangan hidup rumah tangga akibat terputusnya usaha-usaha penduduk membangun SL melalui kebun kelapa sawit. Strategi SL yang dikembangkan bervariasi dan dilakukan oleh berbagai kelompok mengandung makna: 1) penduduk setempat berusaha memanfaatkan *human capital* yang dimiliki, karena ternyata krisis yang terjadi tidak membuat semua orang putus asa dan hilang akal. Situasi yang ada justru menyadarkan kelompok-kelompok seperti kaum perempuan dan kaum terdidik, berpendidikan banting stir, menangkap peluang yang ada untuk berusaha membangun SL dengan berbagai cara. Demikian pula golongan muda putus sekolah, tunakarya yang minim ketrampilan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang dapat dilakukannya untuk membangun hidup sesuai dengan kapabilitasnya sebagai orang muda. 2) Terbebaskan dari perangkap kemiskinan. Usaha mengembangkan SL tentunya memberi pesan bahwa penduduk setempat tidak ingin terjebak dalam perangkap kemiskinan sebagaimana pada umumnya terjadi ketika *livelihood* penduduk hilang dan diandaikan pula hilang semua modal-modal atau aset-aset yang dipunyai penduduk turut hilang. Memang bila dilihat dari ungkapan penduduk ketika diwawancarai saat penelitian berlangsung dikatakan bahwa saat ini penduduk tidak memegang uang lagi seperti masa-masa awal panen kelapa sawi di Workwana tapi dapat dilihat dari apa yang diusahakan ternyata penduduk setempat mempunyai *human capital* yang dapat difungsikan menanggulangi tantangan dan tekanan hidup yang dialami.

Ketiga, akibat proses interaksi sosial dengan penduduk lain khususnya kaum pendatang transmigrasi terjadi proses belajar bersama bagaimana mengembangkan diversifikasi *livelihood* yang untuk menangkal dan menanggulangi permasalahan SL.

Keempat, kelompok perempuan menangkap peluang ekonomi melalui pasar dan usaha keluarga yang dapat dilakukan di rumah. Sedangkan kaum berpendidikan melihat peluang lain sesuai dengan perkembangan daerah untuk berprofesi sebagai pegawai negeri, pengusaha, atau politisi. Kemudian



kelompok muda tunakarya memanfaatkan apa yang bisa dilakukan bila peluang-peluang yang ada tidak menuntut ketrampilan-ketrampilan khusus.

Fenomena yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa di satu sisi hak-hak masyarakat setempat tetap perlu diperjuangkan dan diatur kembali, imbalbeli melalui penyerahan aset-aset berupa hutan, tanah dan segala kekayaan alam yang ada di atasnya hendaknya diproses dan ditata kembali agar mengandung unsur-unsur keadilan dan kepastian bagi penduduk, karena menurut penduduk setempat ketidakadilan dan ketidakpastian dalam transaksi imbal-beli aset-aset SL telah menciptakan *vulnerability context* (Morse & McMara, 2013) yang dapat mengekalkan kerentanan serta kemiskinan baik pada aras individu dan lingkungannya maupun pada konteks yang lebih luas yakni masyarakat di wilayah Keerom.

Kesimpulan dan Saran

Pertama, perkebunan industri kelapa sawit sebagai sistem ekonomi pasar yang kapitalistik, masuk dalam kehidupan penduduk asli di kampung Workwana dan sekitarnya di Distrik Arso Kabupaten Keerom sebagai sistem *livelihood* baru. Sistem *livelihood* baru melalui perkebunan sawit mengandaikan adanya kapabilitas masyarakat yang sesuai dengan tuntutan sistem usaha yang baru pula. Diakui atau tidak pendekatan tersebut telah menyingkirkan *livelihood* masyarakat setempat dengan segala kapabilitas, aset dan aktivitas untuk membangun kehidupannya secara berkelanjutan dan bermakna baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, SL sebagai bentuk usaha, kegiatan mandiri dan berkelanjutan masyarakat lokal hilang karena semua aset yang dimiliki beralih fungsi dan beralih kepemilikan serta tiadanya aktivitas-aktivitas lokal yang dapat memperlihatkan kapabilitasnya mengusahakan kehidupan yang bermakna sesuai dengan *worldview*-nya. Tersingkirnya SL berarti pula tersingkir dan terabaikannya nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam *world view* (Geertz, 1973; Mantovani, 1998; Alua, 2004) masyarakat seperti, *community, life, relationship, exchange* (Mantovani, 1993). Tersingkirnya *sustainable livelihood* setempat berarti pula hilangnya kapabilitas masyarakat untuk mengaktualisasikan diri sebagaimana adanya. Ketiadaan kapabilitas dalam diri seseorang menimbulkan apa yang disebut Zen (1999; 2000) sebagai bentuk *deprivasi*. Dengan demikian, tersingkirnya *sustainable livelihood* menimbulkan *deprivasi* yang menjerat penduduk ke dalam perangkap kemiskinan. Deprivasi dan perangkap kemiskinan ditandai oleh hilangnya berbagai *capital* yang dimilikinya, yakni *natural capital, economic capital, human capital* dan *social capital*-nya. Ketiadaan kapital-kapital yang dibutuhkan untuk hidup itulah

yang disebut Sachs (2005) sebagai keadaan yang menyebabkan masyarakat terperangkap dalam kemiskinan.

Kedua, strategi *coping* yang terlihat dalam kehidupan orang Workwana belum disertai berbagai persyaratan pengembangan *livelihoods* berkelanjutan. Usaha-usaha penduduk masih merupakan usaha individu tanpa berjejaring dengan pihak lain. Kemudian usaha yang dilakukan belum ditandai oleh diversifikasi usaha karena modal usaha yang terbatas dan dukungan lain yang dibutuhkan. Sachs (2005) menjelaskan bahwa usaha rumah tangga hendaknya didukung oleh faktor-faktor berikut, adanya tabungan, adanya kegiatan usaha, tersedianya sumber daya manusia dan adanya dukungan teknologi. Gambar berikut memuat faktor-faktor yang harus ada dalam sebuah rumah tangga untuk berusaha, secara khusus mengembangkan usaha ekonomi skala kecil sebagaimana ditawarkan oleh pendekatan *livelihoods* berkelanjutan bagi penduduk desa atau kampung.

Gambar 3

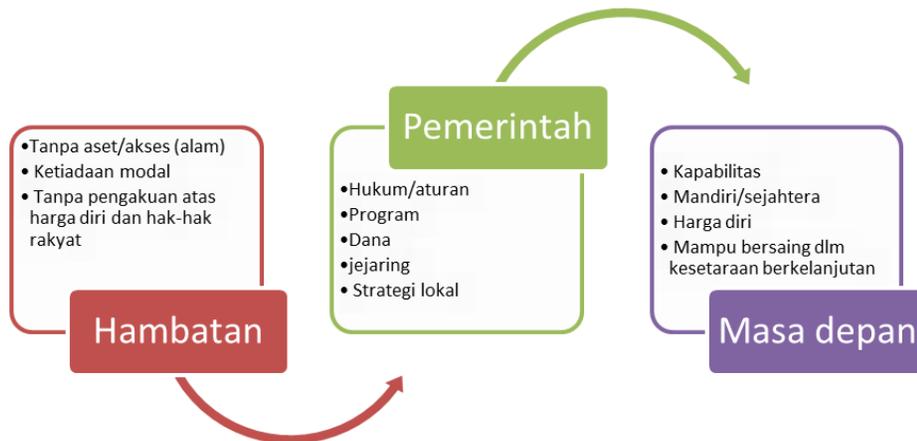
Faktor-faktor Penentu Pendapatan Rumah tangga



Sumber: diolah dari J. De Sachs (2005)

Ketiga, peran pemerintah dan stakeholder. Untuk mendukung *livelihood* penduduk seperti orang Workwana yang melakukan strategi *coping* sesuai kapabilitasnya, menurut hemat penulis perlu didukung oleh pemerintah daerah setempat dan *stakeholder* yang ada. Gambar di bawah ini dapat menjelaskan peran intervensi dimaksud.

Gambar 4
Alur intervensi SL yang Baru



Gambar di atas merupakan suatu gambaran situasi yang diharapkan terjadi di dalam kehidupan rumah-rumah tangga di Workwana melalui intervensi pemerintah dan stakeholder yang ada. Unsur-unsur yang dikelompokkan dalam kotak-kotak di atas terdiri dari tiga macam situasi dan peran yang saling memengaruhi kehidupan rumah-rumah tangga di Workwana. *Pertama*, perlu menyadari hambatan-hambatan yang ada meliputi keadaan tanpa aset dan akses. Penduduk hidup dengan modal-modal yang terbatas bahkan nyaris tanpa modal serta tidak dihargai eksistensinya. *Kedua*, Peran pemerintah dan stakeholder. Peran tersebut diharapkan memberi perlindungan dan akses dalam bentuk hukum (aturan) yang pro-rakyat, program-program bersifat afirmatif dan pemberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan untuk kemandirian secara berkelanjutan. Namun intervensi tersebut diharapkan tidak mengabaikan strategi lokal masyarakat setempat yang mandiri dan melakukan penguatan terhadap strategi lokal tersebut sehingga memungkinkan terjadinya diversifikasi *livelihoods*. *Ketiga*, Masa depan. Diharapkan terjadi pemberdayaan serta peningkatan kapabilitas, ketrampilan, kemampuan bersaing, percaya diri, mandiri dan inovatif secara berkelanjutan dan terhindar dari eksploitasi sosial dan ekonomi. *Keempat*, mengembangkan alternatif pendekatan pembangunan kampung yang berciri *etnodevelopment* (Bdk. Nieukoop & Uquillas, 2000; Chernela, 2011): berpusat pada manusia, lingkungan hidup dan kearifan setempat.



Daftar Rujukan

- Acemoglu, Daron & James A Robinson. 2012. *Mengapa Negara Gagal. Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan*. Terjemahan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia.
- Aditjondro, Junus George. 2003. *Korban-Korban Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akhmad. 2005. *Amber dan Komin. Studi Perubahan Ekonomi di Papua*, Yogyakarta: Biograf Publishing.
- Alan Barnard & Jonathan Spencer (Ed.). 1996. *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*. London & New York: Routledge.
- Bakhit, Izzedin, dkk. 2001. *Menggempur Akar-Akar Kemiskinan*. Terjemahan. Jakarta: YAKOMA-PGI.
- Boelaars Jan. 1986. *Manusia Irian, Dahulu, Sekarang, Masa Depan*, Jakarta: PT Gramedia
- Brock Karen. *Implementing a Sustainable Livelihoods Framework For Policy-Directed Research: Reflections From Practice In Mali*. Working Paper 90. URL: <http://www.ids.ac.uk/file/Wp90.pdf>. Diunduh 18 Juli 2014.
- Budiman Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chambers Robert dan Conway R. Gordon. 1991. *Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21 st century*. Institute of Development Studies, ISBN 0 903715 58 9. Themes: agricultural and rural problem; food security; environment, IDS Discussion Paper 296. Dp296.pdf. Diunduh pada 12 Februari 2016.
- Chernela M. Janet. 2011. "Indigenous Rights and Ethno-Development: The Life of an Indigenous Organization in the Rio Negro of Brazil," dalam *Tipiti: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America*. USA: University of Maryland, chernela@gmail.com. Diunduh pada 28 Agustus 2017.
- Colchester Marcus & Chao Sophie (Ed.). 2013. *Conflict or Consent? The Oil Palm Sector at a Crossroads*. Moreton-in Marsh, Bogor, Jakarta: Forest Peoples Programme, Perkumpulan Sawit Wacth, Transformasi untuk Keadilan Indonesia.
- Colchester, Marcus, dkk. 2007. *Promised Land, Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*.



- Moreton, England & Bogor: Forest People Programme (FPP) & Perkumpulan Sawit Watch (SW).
- Common, Michael dan Stagl Sigrid. 2005. *Ecological Economics. An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cypri J. P. Dale & John Djonga. 2011. *Paradoks Papua, Pola-pola Ketidakadilan Sosial, Pelanggaran Hak atas Pembangunan dan Kegagalan Afirmatif, dengan Fokus di Kabupaten Keerom*. Jayapura: FOKER LSM Papua, Yayasan Teratai Hati Papua, Arso, Sunspirit For Justice and Peace.
- Dale, Cypri J. P. & Djonga John. 2011. *Paradoks Papua, Pola-pola Ketidakadilan Sosial, Pelanggaran Hak atas Pembangunan dan kegagalan Kebijakan Afirmatif, dengan Fokus di Kabupaten Keerom*. Jayapura: Yayasan Teratai Hati Papua.
- Rosariyanto, Edy, dkk. 2008. *Penelitian Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura dan Sekretariat Pastoral Dekanat Keerom*. Jayapura: Keuskupan Jayapura.
- Enembe, Lukas. 2016. *Papua. Antara Uang dan Kewenangan*. Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.
- Erari, Phil Karel. 1997. "Tanah Kita, Hidup Kita. Pendekatan Budaya Melanesia dalam Rangka Krisis Ekologi Global," dalam *Prisma*, 6 Juni-Juli. Jakarta.
- Escobar, Arturo. 1995. *Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton, New York: Princenton University Press
- Fay, Brian. 1997. *Contemporary Philosophy of Social Science. Multicultural Approach*. Malden, Massachussets: Blacwell Ltd.
- Franky, L. Y. dan Morgan Selvyn (Peny.). 2015. *Atlas Sawit Papua: Di Bawah Kendali Penguasa Modal*. Jakata: Pusaka.
- Goldman Ian. *Improving Institutional Support To Promote Sustainable Livelihoods In Southern Africa*. URL: <http://www.colss.net/sample-chapters/c14/el-43-01-05.pdf>. Diunduh pada 18 Juli 2014.
- Haan, De J. Leo. 2012. "The Livelihood Approach: A Critical Exploitation," dalam *Erdkune*, Vol. 66. No. 4, 345-357, EK-66-2012-05 (1)-pdf. Diunduh pada 12 Februari 2016.
- Ife, Jim. 2002. *Community Development*. Sydney: Longman.
- Jain, K.A. 2001. *Ecology and Natural Resource Management for Sustainable Development*. New Delhi: Shakun Printers.



- Khan, R James. 2005. *The Economic Approach to Environmental and Natural Resources*. Washington: Thomson South Western.
- Krantz Lasse. 2001. *The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction. An Introduction*. URL: http://www.forestry.umn.edu/prod/group/.../cfans_asset_202603.pdf. Diunduh pada 18 Maret 2014.
- Kristian Ansaka dkk. 2009. *Dari Kampung Ke Kampung, Perjalanan Jurnalistik Suara Perempuan Papua*, Jayapura: Tabloid Suara Perempuan Papua.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Malak, S. 2006. *Kapitalisasi Tanah Adat*. Cetakan Kedua. Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri
- Marti, Serge. 2008. *Losing Ground: The Human Rights Impacts of Oil Palm Plantation Expansion in Indonesia*. Friend of Earth, LifeMosaic and SawitWatch. URL: <http://www.foei.org/>.
- Nelson John & Hussein Karim. "Sustainable Livelihoods And Livelihoods Diversification," IDS Working Paper 69. URL: <http://www.ids.ac.uk/files/Wp69.pdf>. diunduh 18 Juli 2014.
- Nieuwkoop van Martien & Jorge E. Uquillas. 2000. *Defining ethnodevelopment in Operational Terms: Lessons from the Ecuador Indigenous and Afro-Ecuadoran Peoples Development Project* : The World Bank Latin America and Caribbean Regional Office, Environmentally and Socially Sustainable Development SMU. URL: pbrandrissa@worldbank.org. Diunduh 21 April 2017.
- Noda J. Pamela (Ed.). 1999. *Sustainable Development and Human Security*. Tokyo, New York, Singapore: Japan Center for International Exchange-Institute of Southeast Asian Studies.
- Renwarin Bernardus. 2017. *Termarginalisasi Kelapa Sawit. Resistensi dan Coping Orang Workwana Papua*. Salatiga: Satya Wacana Univerisity Press.
- Rudolfus Gusbager Kondrat. 2001. *Ritus Inisiasi Yonggway dan Sebuah Pendekatan Pastoral dalam Kehidupan Masyarakat Arso-Keerom di Wilayah Perbatasan Jayapura*. Skripsi S-1 (Tidak diterbitkan). Abepura: STFT Fajar Timur.
- Sachs Jeffrey D. 2005. *The End of Poverty, Economic Possibilities for Our Time*. New York: The Penguin Press.
- Satria, Arif, Ernani Rustiadi, Agusina M.P. 2011. *Menuju Desa 2030*. Bogor: Crespent Press.



- Scoones Ian. 2009. "Livelihoods Perspektif and Rural Developoment," dalam *Juornal of Peasant Studies*, Vol. 36, No. 1, January. URL: http://www.essentialcellbiology.com/journals.pdf/papers/fjps_36_1_2009.pdf. Diunduh 18 Juli 2014.
- Sen Amartya. 1999. *Development As Freedom*. New York: Anchor Books.
- Soedjatmoko. 1980. *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta: LP3ES
- Suebu, Barnabas. 2007. *Kami Menanam, Kami Menyiram, Tuhanlah yang Menumbuhkan*. Jayapura: Pemerintah Provinsi Papua.
- Tim Peneliti Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian jaya (YPMD-IRJA). 1999. *Dampak Pengembangan Proyek PIR Kelapa Sawit terhadap Partisipasi Kaum Perempuan Kerom dalam Produksi Keluarga di Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura*. (Makalah Seminar, tidak dipublikasikan). YPMD, Jayapura.
- Titus J. Milan & P. M. Burgers. 2008, *Rural Livelihoods. Resources and Coping with Crisis in Indonesia. A Comparative Study*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Wenchen Agustinus. 2005. *Petskha Vai, Konflik Tanah pada Orang Walsa di Papua*. Yogyakarta: Kunci Ilmu.
- Whiteman L. Darrel (Ed.). 1984. *An Introduction to Melanesian Cultures*. Goroka (PNG): The Melanesian Institute.

